

**IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN DUKUNGAN
PSIKOSOSIAL (LDP) PASCABENCANA
(STUDI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA)**

Rangga Bima Setiawan¹
Harits Hijrah Wicaksana²
Surryanto Djoko Waluyo³
Agung Edi Rustanto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Esa Unggul, Jakarta -Indonesia

Alamat email Koresponden: ranggabimasetiawan8@gmail.com

ABSTRACT

The Psychosocial Support Service Programme (LDP) of the Jakarta Capital Region Disaster Management Agency (BPBD) faces serious challenges in the form of limited human resources, a constrained budget, and suboptimal coordination. This study aims to analyse the implementation of the LDP programme, covering planning, execution, resource allocation, and stakeholder engagement. The method used is qualitative, employing a phenomenological approach according to John W. Creswell. Data were collected through observation, interviews, and document analysis, and subsequently analysed using George C. Edward III's policy implementation theory, which focuses on factors such as communication, resources, implementer disposition, and organisational structure. The research findings indicate variations in implementation across these four aspects. Regarding communication, inter-agency coordination remains unintegrated. In terms of resources, improvements have been observed, such as the procurement of psychosocial vehicles and enhanced staff skills, although budgets and personnel remain limited. Implementers' dispositions were assessed as reasonably good, whilst the primary constraint lies in the organisational structure due to the absence of standardised instruments, which hinders field effectiveness. This study recommends strengthening inter-agency coordination and the development of clear Standard Operating Procedures (SOPs). Its contribution is to provide practical guidance for the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and stakeholders to achieve more integrated and responsive psychosocial services.

Keywords: *psychosocial, post-disaster, disaster management*

PENDAHULUAN

DKI Jakarta memiliki indeks risiko bencana sebesar 60,43 (sedang) dengan ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ektrim, dan abrasi (IRBI, 2021). Secara geografis, Jakarta dialiri oleh 13 sungai dan sebagian besar wilayah utara berada di bawah permukaan laut, menjadikannya sangat rentan terhadap banjir saat hujan deras. Tercatat curah hujan ekstrem sebesar 377 mm/hari pada tahun 2020 (KRB, 2022). Data lima tahun terakhir menunjukkan frekuensi kejadian bencana masih tinggi, seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan pohon tumbang.

Tabel 1. Kejadian Bencana Tahun 2020 - 2024

No.	Jenis Bencana	Kejadian / Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banjir	101	72	129	65	108
2.	Kebakaran	543	536	645	864	734
3.	Tanah Longsor	17	12	14	22	36
4.	Cuaca Ekstrim	2	2	13	4	13
5.	Pohon Tumbang	123	236	378	234	333

Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Bencana di Jakarta, khususnya kebakaran rumah dan banjir, menimbulkan dampak beragam, baik kerusakan maupun kerugian secara fisik, sosial, dan ekonomi. Dampak sosial dan psikologis menjadi perhatian utama karena mengurangi kapasitas adaptasi masyarakat akibat perubahan dalam kehidupan pribadi, interpersonal, sosial, dan ekonomi setelah bencana. Layanan Dukungan Psikososial (LDP) hadir sebagai program pelayanan sosial yang esensial untuk memulihkan kondisi sosial masyarakat terdampak bencana. Melalui program LDP yang terarah,

terencana, terorganisir, terstruktur, dan kolaboratif, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara baik dan berkelanjutan.

BPBD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Program Layanan Dukungan Psikososial melalui Bidang Rehabilitasi dan Rehabilitasi, Seksi Peningkatan Sosial Ekonomi sebagai koordinator penanggulangan bencana. Namun, kapasitas sumber daya masih sangat terbatas. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa anggaran tahunan yang dialokasikan masih rendah, infrastruktur minim, serta jumlah sumber daya manusia tersertifikasi hanya 60 orang untuk enam wilayah administrasi di Jakarta. Kondisi ini sangat tidak mendukung optimalisasi program.

Table 2. Pelaksanaan dan Anggaran LDP Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan dan Anggaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kegiatan LDP	9	23	27	28	22
2.	Anggaran LDP (Juta)	N/A	22	17	65	50
3.	Terdampak Bencana (Jiwa)	N/A	8061	6387	6500	7407

Sumber : BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Dari fenomena dan kondisi ideal penanganan pasca bencana, muncul sejumlah permasalahan seperti koordinasi yang tidak efektif antar lembaga, keterbatasan pendekatan terpadu, kurangnya pemberdayaan masyarakat, tantangan perlindungan dan pelayanan khusus, serta lambatnya tingkat pemulihan akibat birokrasi dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena tidak hanya bersifat akademis, melainkan juga kontribusi praktis untuk memahami akar masalah dan menawarkan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan. Dengan demikian, hasil studi diharapkan menjadi katalis bagi perbaikan kebijakan dan praktik

penanggulangan bencana agar masyarakat terdampak dapat pulih secara fisik maupun mental.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program LDP dilakukan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana program LDP direncanakan dan dilaksanakan, mengevaluasi mekanisme pelaksanaan program, menilai ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, serta menilai tingkat keterlibatan pihak-pihak terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi.

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, hipotesis formal tidak dirumuskan. Namun, penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta belum adanya instrumen baku menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi Program LDP di DKI Jakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dengan cakupan lokasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai instansi utama yang mengoordinasikan Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Waktu penelitian berlangsung pada tahun 2024, dengan rentang analisis yang mencakup data kegiatan LDP serta kejadian bencana dari tahun 2020 hingga 2024. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi lapangan, serta diskusi dengan pihak-pihak terkait. Sementara itu, data sekunder

dikumpulkan dari dokumen resmi BPBD Provinsi DKI Jakarta, laporan tahunan, arsip kebijakan, serta data statistik kebencanaan yang relevan.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, dengan informan kunci adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang berperan sebagai penanggung jawab dan pengawas pelaksanaan kegiatan. Informan utama adalah Kepala Seksi Peningkatan Sosial Ekonomi dan Kepala Seksi Pemulihan Korban sebagai pelaksana program, sedangkan informan tambahan terdiri dari staf dan pelaksana lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama. Pertama, observasi yang memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung pelaksanaan program serta dinamika kerja di lapangan. Kedua, wawancara mendalam dengan informan penelitian untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pemahaman mereka. Ketiga, dokumentasi berupa telaah laporan kegiatan, dokumen perencanaan, dan data kebencanaan yang memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Uji keabsahan data dilakukan dengan kriteria yang dikemukakan Guba dan Lincoln (1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga dengan triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Transferabilitas dijaga dengan memberikan deskripsi yang rinci mengenai konteks penelitian agar dapat diaplikasikan pada kondisi serupa. Dependabilitas dan konfirmabilitas dipastikan dengan menyusun catatan proses penelitian secara transparan sehingga dapat ditelusuri oleh pihak lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis ini meliputi tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah dari lapangan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks agar dapat dipahami secara komprehensif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan penelitian dirumuskan menjadi hasil yang memiliki nilai teoritis maupun praktis.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama dalam menganalisis implementasi kebijakan publik. Variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Teori ini memberikan landasan dalam proses penelitian yang dilaksanakan. Berikut penjelasan dari setiap dimensi dalam teori :

- 1) Komunikasi mengacu pada sejauh mana informasi mengenai kebijakan dapat disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh para pelaksana di lapangan. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan berpotensi disalahartikan atau tidak dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya.
- 2) Sumber daya meliputi ketersediaan personel, dana, sarana prasarana, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya akan memengaruhi efektivitas kebijakan, meskipun kebijakan tersebut dirancang dengan baik.

- 3) Disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada kemauan, komitmen, serta integritas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, maka peluang keberhasilan implementasi akan lebih besar.
- 4) Struktur birokrasi terkait dengan prosedur, alur kerja, serta sistem koordinasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku atau tidak memiliki instrumen baku dapat menjadi hambatan serius dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Dengan menggunakan teori Edward III, penelitian ini dapat memetakan bagaimana Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta diimplementasikan, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dari setiap variabel tersebut.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi BPBD dalam Program LDP

Menurut Edwards III, tiga aspek krusial yang membangun komunikasi efektif adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi merujuk pada proses penyaluran informasi dari sumber (pembuat kebijakan) ke penerima (para pelaksana dan target grup). Edwards III menekankan perlunya penggunaan "mekanisme transmisi yang tepat" untuk memastikan keberhasilan implementasi. Kegagalan dalam aspek ini sering kali disebabkan oleh saluran komunikasi yang tidak memadai, sehingga pesan kebijakan gagal mencapai audiens yang dituju. Kejelasan berkaitan dengan bagaimana pesan kebijakan dipahami oleh penerima. Pesan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda atau kesalahpahaman. Ketidakjelasan dapat

berasal dari ambiguitas dalam bahasa atau ketidaksesuaian antara pesan yang disampaikan dengan fakta di lapangan, dan Konsistensi merujuk pada keseragaman pesan yang disampaikan oleh berbagai pihak pelaksana kebijakan dari waktu ke waktu. Inkonsistensi sering terjadi ketika ada tumpang tindih kewenangan atau kurangnya koordinasi antara lembaga yang berbeda.

Kendala komunikasi dan koordinasi lintas sektor menunjukkan perlunya reformasi tata kelola program LDP. Penyusunan SOP dan protokol koordinasi yang baku tidak hanya akan mempercepat respons, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan mencegah duplikasi layanan. Selain itu, penguatan sistem Monev khusus LDP akan memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap dampak program.

2. Sumber Daya BPBD dalam Pelaksanaan Program LDP

Menurut George C. Edwards III, ada empat aspek krusial terkait sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Empat aspek ini saling berkaitan dan harus tersedia secara memadai.

1) Sumber Daya Manusia (*Personnel*)

Aspek ini merujuk pada ketersediaan staf yang memadai dan kompeten untuk melaksanakan suatu program. Maknanya adalah bahwa tidak peduli seberapa baik suatu kebijakan dirancang, keberhasilannya sangat bergantung pada orang-orang yang melaksanakannya di lapangan. Mereka harus memiliki keahlian, pengalaman, dan pemahaman yang cukup tentang tugas yang diberikan. Selain itu, motivasi dan sikap positif dari para pelaksana juga menjadi faktor penting.

2) Sumber Daya Finansial (*Provisions*)

Aspek ini berkaitan dengan anggaran dan dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu program. Maknanya adalah bahwa uang adalah "bahan bakar" bagi setiap implementasi kebijakan. Tanpa alokasi dana yang cukup, program tidak akan bisa berjalan. Misalnya, untuk mengadakan pelatihan, membeli peralatan, atau membayar gaji staf, semuanya membutuhkan dukungan finansial. Kekurangan dana bisa menghambat atau bahkan menghentikan implementasi sepenuhnya.

3) Sumber Daya Fisik (*Facilities*)

Aspek ini mencakup fasilitas fisik, peralatan, dan teknologi yang diperlukan. Maknanya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ini bisa berupa gedung kantor, kendaraan, komputer, alat berat, atau infrastruktur lain yang esensial. Tanpa alat dan fasilitas yang tepat, para pelaksana tidak dapat bekerja secara efektif. Sebagai contoh, sebuah program kesehatan tidak akan sukses jika tidak ada klinik atau peralatan medis yang memadai.

4) Kewenangan/Otoritas dan Informasi (*Authority and Information*)

Aspek ini merujuk pada kekuatan hukum atau kewenangan resmi dan data yang relevan. Maknanya adalah bahwa para pelaksana harus memiliki otoritas yang jelas untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sesuai dengan kebijakan. Tanpa kewenangan, tindakan mereka bisa dipertanyakan atau tidak memiliki legitimasi. Di sisi lain, informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting

untuk membuat keputusan yang efektif dan menyesuaikan implementasi dengan kondisi yang berubah.

Keterbatasan sumber daya yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan tantangan umum di daerah rawan bencana. Kondisi ini menyebabkan LDP lebih bersifat reaktif daripada proaktif, sehingga layanan psikososial cenderung diberikan setelah bencana terjadi, bukan sebagai bagian dari mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.

3. Disposisi Pada Implementasi Program LDP

Menurut Edwards III, disposisi terbagi menjadi beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek-aspek ini adalah:

1) Dampak Disposisi (*Effects of Dispositions*)

Maknanya adalah konsekuensi atau hasil dari sikap para pelaksana kebijakan. Ini mengacu pada tingkat kepatuhan dan responsivitas para birokrat terhadap suatu kebijakan. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif, setia, dan berkomitmen terhadap tujuan kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, sehingga implementasi akan berjalan lancar dan efektif. Sebaliknya, jika mereka tidak setuju atau merasa kebijakan itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau organisasional, mereka mungkin akan menghambat atau menolak pelaksanaannya, bahkan tanpa disadari.

2) Staf Birokrasi (*Staffing the Bureaucracy*)

Aspek ini berhubungan dengan penempatan atau penugasan personel yang tepat di posisi-posisi kunci dalam

birokrasi. Maknanya adalah bahwa untuk memastikan disposisi yang positif, pembuat kebijakan harus cermat dalam memilih dan menempatkan orang-orang yang mendukung tujuan kebijakan. Jika birokrasi diisi oleh staf yang secara ideologis atau profesional bertentangan dengan kebijakan, akan sangat sulit untuk mencapai tujuan implementasi. Oleh karena itu, penunjukan pejabat yang sejalan dengan visi kebijakan menjadi strategi penting.

3) Insentif (*Incentives*)

Aspek ini berkaitan dengan mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) untuk memotivasi para pelaksana. Maknanya adalah bahwa insentif adalah alat untuk memanipulasi disposisi para birokrat agar sejalan dengan tujuan kebijakan. Insentif dapat berupa kenaikan gaji, promosi, pengakuan, atau bahkan ancaman sanksi bagi mereka yang tidak patuh. Dengan kata lain, jika para pelaksana merasa ada keuntungan pribadi (baik finansial maupun non-finansial) dalam melaksanakan kebijakan, disposisi mereka untuk melakukannya akan meningkat secara signifk.

Penelitian ini mengungkap bahwa keberhasilan LDP di DKI Jakarta memiliki dualitas: sebagai keunggulan sekaligus kelemahan. Keunggulannya terletak pada tingginya komitmen pelaksana, yang mampu menjaga kelangsungan layanan meskipun dengan sumber daya terbatas. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan yang tinggi pada faktor manusia, yang rentan terhadap fluktuasi motivasi dan rotasi personel.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III, struktur birokrasi adalah faktor krusial yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Ia mengidentifikasi dua aspek utama dalam struktur birokrasi: *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentation* (Fragmentasi).

1) Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedures*)

Maknanya adalah prosedur kerja standar yang terperinci dan ditetapkan secara formal. SOP dirancang untuk memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan secara konsisten dan seragam oleh semua staf. Dalam konteks implementasi kebijakan, SOP memiliki dampak ganda seperti dampak positif, dimana SOP dapat meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas. Para pelaksana tahu persis apa yang harus dilakukan, sehingga mengurangi kebingungan dan inkonsistensi. Ini sangat membantu untuk program-program yang membutuhkan proses yang sama berulang-ulang. Adapun dampak negatif yakni Sering kali, SOP bersifat kaku. Ini bisa menghambat kreativitas, inisiatif, dan kemampuan staf untuk beradaptasi dengan situasi unik atau tidak terduga di lapangan. Jika kebijakan baru membutuhkan fleksibilitas, SOP yang kaku bisa menjadi penghalang.

2) Fragmentasi (*Fragmentation*)

Maknanya adalah pemecahan atau pembagian tanggung jawab implementasi kebijakan kepada banyak unit atau lembaga yang berbeda. Alih-alih satu lembaga yang mengurus seluruh program, tugas tersebut dibagi-bagi di

antara beberapa kementerian, departemen, atau agensi. Dampak dari fragmentasi ini juga memiliki sisi positif dan negatif:

- a. Dampak Positif yang ditimbulkan adalah terjadinya fragmentasi yang memungkinkan spesialisasi. Setiap unit dapat fokus pada aspek tertentu dari kebijakan yang sesuai dengan keahlian mereka.
- b. Dampak Negatif yang dirasakan adalah dimana Fragmentasi bisa menimbulkan masalah koordinasi yang serius. Kesulitan komunikasi, perbedaan prioritas, dan persaingan antarlembaga dapat menyebabkan program menjadi tidak sinkron dan kurang efisien. Para pelaksana kebijakan sering kali harus bekerja melintasi batas-batas organisasi, yang bisa menjadi hambatan besar bagi kelancaran implementasi.

Secara keseluruhan, LDP di DKI Jakarta memiliki potensi menjadi model layanan psikososial pascabencana di tingkat nasional, asalkan kelemahan struktural dan sumber daya dapat diatasi. Implementasi perbaikan memerlukan kolaborasi multisektor, melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal. Dengan sinergi yang kuat, keberlanjutan, efektivitas, dan kualitas layanan LDP dapat terjamin.

SIMPULAN

Implementasi Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Pascabencana oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan analisis teori George C. Edward III, menunjukkan bahwa transmisi informasi

antara para pelaksana LDP mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan sudah terjalin dengan cukup baik, dengan menggunakan sistem komando dan model hirarki kejelasan informasi tersampaikan dengan baik, ini berdampak signifikan pada respon para pelaksana LDP, akan tetapi belum dirasakan secara keseluruhan karena konsistensi yang masih terpengaruh dengan faktor posisi, kedudukan, dan politis dari pimpinan di BPBD DKI Jakarta khususnya eselon 3 dan eselon 2.

Sumber daya manusia yang ada di BPBD DKI Jakarta khususnya para pelaksana LDP masih dirasakan kurang walaupun sudah cukup berkompeten, namun jumlah warga Jakarta yang mencapai 13 juta jiwa membuat kekuatan jumlah personil pelaksana LDP terasa sangat tidak proposional. Ditinjau dari sarana dan prasarana, BPBD dalam melaksanakan program LDP memiliki fasilitas 2 unit mobil LDP, untuk menjangkau luasan wilayah Jakarta untuk saat ini sangat tidak proposional, mengingat kejadian bencana sering terjadi dalam kurun waktu berdekatan dengan wilayah yang berbeda.

Para pelaksana program LDP memiliki disposisi yang sangat baik, patuh pada perintah, dan loyal kepada atasan. Penempatan posisi para pelaksana LDP di BPBD sudah sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, di mana para pelaksana ini ditempatkan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi karena bidang inilah yang menjadi pengampu dari program LDP. Namun dengan dedikasi yang tinggi tidak berbanding lurus dengan penghargaan (rewards) yang diperoleh para pelaksana, hanya totalitas dan ucapan pujian dari pimpinan yang mewarnai hari-hari setelah pelaksanaan program LDP. Tidak ada insentif khusus bagi para pelaksana LDP di BPBD DKI Jakarta.

Tidak adanya instrumen baku menghambat efektivitas program LDP di lapangan. SOP internal apalagi SOP eksternal lintas OPD sama sekali belum di buat, para pelaksana dalam melaksanakan program LDP di lokasi bencana hanya berdasarkan perintah dan alur kerja mengikuti rutinitas yang sudah di lakukan selama ini. Meskipun Instruksi Sekretaris Daerah telah ada, pelaksana menganggapnya belum cukup menjadi payung hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi BPBD perlu dikaji ulang agar dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih lancar. Sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase pascabencana BPBD DKI Jakarta memberikan kewenangan khusus dalam pelaksanaan program LDP, Insekda 21 tahun 2021 mengfragmentasikan dengan baik tugas dan fungsi OPD dalam pelaksanaan program LDP, namun perlu diperkuar dengan adanya pengaturang dan pembagian segmentasi layanan sehingga tidak terjadi duplikasi anggaran dan tumpang tindih pelaksanaan program LDP di lokasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, D. (2013). *Resilience and disaster risk reduction: An etymological journey*. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 13(11), 2707–2716. <https://doi.org/10.5194/nhess-13-2707-2013>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2021*. BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Laporan data kejadian bencana dan pelaksanaan program layanan dukungan psikososial tahun 2020–2024*. BPBD Provinsi DKI Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- IFRC. (2018). *Guidelines for the implementation of psychosocial support in emergency settings*. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
- Inter-Agency Standing Committee. (2007). *Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings*. IASC.
- May, P. J. (2012). Policy design and implementation. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *The SAGE handbook of public administration* (2nd ed., pp. 279–292). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Kajian risiko bencana (KRB) Provinsi DKI Jakarta*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelaksanaan layanan dukungan psikososial*. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- UNDRR. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
- World Health Organization. (2013). *Building back better: Sustainable mental health care after emergencies*. WHO Press.